



PEMAHAMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah salah satu negara bangsa yang sangat beragam di dunia. Menurut data etnografi, di Indonesia terdapat sekitar 656 suku mulai dari yang besar hingga suku-suku kecil di bagian timur Indonesia. Sementara jumlah bahasa di Indonesia, menurut penelitian pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, ada lebih dari 500 bahasa yang digunakan di Indonesia. Keragaman yang kita miliki tentu saja harus kita lihat sebagai kekayaan yang layak untuk disyukuri. Namun, kita juga sungguh menyadari bahwa keragaman ini bisa menjadi masalah yang dapat menciptakan perselisihan dan konflik. Karena kesadaran ini, para pendiri bangsa sejak awal berupaya untuk menemukan “*common denominator*” di antara yang berbeda. Pancasila dalam hal ini merupakan “*common denominator*” di antara yang beragam itu. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi titik temu di antara berbagai pandangan dan keyakinan yang beragam.

Meski terdiri dari banyak suku bangsa, kita mengidentifikasi diri sebagai bangsa yang satu. Bung Karno menegaskan bahwa gugusan pulau-pulau yang ada di kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Tali pengikatnya ada

pada kebudayaan, bahasa dan yang paling kuat adalah karena kesamaan nasib sebagai jajahan kolonial Belanda. Dengan demikian, meski bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa yang berbeda, mereka mengidentifikasi banyak kesamaan dibanding perbedaan. Orang Minang, orang Jawa, orang Celebes, orang Ambon dan lain-lain mengidentifikasi diri mereka sebagai bangsa Indonesia.

Sejak berdiri pada tahun 2000 melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2000, Banten kini sudah berumur 22 tahun. Secara keseluruhan populasi penduduk berjumlah sekitar 12 juta jiwa. Komposisi penduduk Banten cukup beragam baik secara etnis maupun agama. Terkait dengan kondisi masyarakat Banten saat ini, kita bisa melihat melalui pengamatan dan juga indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga pemerintah baik di tingkat nasional dan tingkat daerah. Menurut laporan yang disampaikan Mohammad Fazri Rodayat, aktivitas gerakan kelompok yang menolak Pancasila (seperti kelompok NII) disinyalir ada dan berkembang di Banten. Kelompok ini tentu saja merupakan ancaman bagi kohesi sosial dan integrasi politik di Banten dan Indonesia.

Dalam soal hubungan antar-umat beragama di Banten kita bisa melihat publikasi Indeks kerukunan antar-umat beragama (KUB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dalam indeks KUB tahun 2019, nilai indeks Provinsi Banten sebesar 68,87. Nilai ini berada di bawah rata-rata nasional yakni 73,83. Nilai tiga dimensi dalam kerukunan seperti prinsip, toleransi, kesetaraan, dan kerjasama selalu berada di bawah rata-rata nasional. Data yang juga bisa kita lihat sebagai bahan pertimbangan adalah laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang dibuat oleh Setara Institut. Dalam laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) tahun 2020, salah satu kota di Banten masuk

dalam 10 kota paling intoleran, yakni kota Cilegon (IKT 2020). Indikator yang diperhatikan dalam indeks ini adalah soal regulasi pemerintah daerah, regulasi sosial, tindakan pemerintah, dan demografi agama.

B. Pembahasan

Pancasila merupakan dasar negara yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa dan menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang beragam. Nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila perlu terus dihidupkan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Untuk tujuan itu maka diperlukan upaya untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu upaya penting yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikannya sebagai kebijakan yang didukung oleh aturan perundang-undangan, misalnya melalui peraturan daerah di level provinsi dan kabupaten-kota. Upaya ini tentu harus dilakukan secara persuasif dan partisipatif dalam arti tidak sepenuhnya bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Proses ini penting untuk diperhatikan agar pengembangan nilai-nilai Pancasila bisa lebih mengakar dari masyarakat. Pengembangan pendidikan nilai-nilai Pancasila juga perlu menampilkan para teladan Pancasila baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, seniman, profesional, media, dan lain-lain.

Penguatan nilai-nilai Pancasila berarti bahwa semua elemen mulai dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus memberikan perhatian pada jaminan kesetaraan politik semua warga negara dan juga proteksi sosial-ekonomi masyarakat. Peraturan Daerah yang akan disusun harus memberikan perhatian upaya realisasi nilai dan visi yang terkandung dalam Pancasila yakni jaminan kesetaraan sipil-politik dan proteksi sosial-ekonomi. Dengan realisasi itu diharapkan akan ada perbaikan signifikan pada

kerukunan dan toleransi antar-kelompok dan antar-umat beragama. Tidak hanya itu, realisasi nilai Pancasila juga harus berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Upaya untuk menghidupkan nilai dan visi Pancasila ini menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha. Semua harus bahu membahu mewujudkan nilai dan visi Pancasila dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks provinsi Banten, kita perlu memerhatikan berbagai problem deprivasi yang dihadapi oleh masyarakat baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. Melalui peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, provinsi Banten berkeinginan menyelesaikan semua kondisi yang masih kurang baik. Selain itu, melalui perda ini Provinsi Banten ingin memaksimalkan berbagai sumber daya daerah yang dimiliki untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila di wilayah Banten. Salah satu sumber daya yang penting dan khas bagi masyarakat Banten adalah peran ketokohan dan kepemimpinan Kiyai dan Jawara. Mereka diharapkan berpartisipasi aktif dalam peran sebagai teladan dan panutan nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks pengembangan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, perangkat provinsi juga perlu memaksimalkan peran pesantren-pesantren di Banten. Sama seperti di provinsi lain di pulau Jawa, Provinsi Banten memiliki banyak pondok pesantren. Di Pangkalan Data Pondok Pesantren milik Kementerian Agama RI, di Banten ada sekitar 4579 pesantren dengan rincian 1168 di Kab. Pandeglang, 1593 di Kab. Lebak, 439 di Kab. Tangerang, 1023 di Kab. Serang, 114 di kota Tangerang, 45 di Kota Cilegon, 121 di Kota Serang, dan 76 di Kota Tangsel.

Jumlah ini tentu saja sangat besar dan bisa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penguatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk generasi masa depan.

Dalam pengembangan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, semua elemen dalam masyarakat harus dilibatkan. Proses implementasinya tidak dilakukan satu arah dari atas ke bawah (*top-down*). Proses pengembangan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan harus dilakukan secara partisipatif dan dengan proses diskursus yang selalu terbuka. Proses partisipatif dan diskursus yang terbuka ini sangat penting karena tiga hal. Pertama, pelibatan masyarakat dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila akan membuat masyarakat merasa memiliki Pancasila. Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing. Dalam kerangka teori diskursus Habermas, kesinambungan antara dunia kehidupan (*Lebenswelt*) masyarakat dengan sistem yang dibangun sangat penting untuk memastikan adanya integrasi sosial dan integrasi sistem. Produk-produk tata kelola kehidupan bersama harus merupakan hasil dari proses diskursif bersama. Tanpa kesinambungan itu, masyarakat akan kesulitan mencerna berbagai produk tata kelola/sistem yang ada. Keterputusan ini tentu bisa mengakibatkan proses implementasi perda menjadi tidak efektif, dan kondisi paling buruk bisa memunculkan resistensi dari masyarakat.

Dalam konteks pengembangan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di provinsi Banten, simpul-simpul penting dalam masyarakat seperti tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya (budayawan, jawara dan lain-lain) harus dilibatkan secara aktif. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menjadi panutan dan juga pembentuk nilai dalam masyarakat. Selain dari peran

ketokohan, pendidikan Pancasila juga perlu melibatkan lembaga pesantren dan pusat-pusat kebudayaan di Banten. Lembaga-lembaga ini memainkan peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai, termasuk nilai-nilai Pancasila. Pelibatan tokoh-tokoh ini dan juga berbagai lembaga penting yang ada di masyarakat akan membuat proses implementasi perda menjadi efektif. Hal yang lebih penting dari itu adalah terbentuknya kesinambungan antara tata kelola yang dibangun dengan proses-proses yang berlangsung dalam kehidupan di akar rumput.

Alasan kedua mengapa proses partisipasi dan diskursus yang terbuka merupakan sesuatu yang penting karena akan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dengan cara ini, penerapan dan pengembangan pendidikan Pancasila akan bisa lebih pas dan relevan. Dengan proses seperti ini, pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak menjadi ajang indoktrinasi yang kaku. Dalam mencari model yang sesuai, para pengembang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu melakukan workshop bersama. Di sini mereka bisa mengeksplorasi berbagai model yang pas dengan audiens yang akan dihadapi. Pengembangan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan berdampak. Alasan ketiga, pengembangan pendidikan yang diskursif juga sejalan dengan Pancasila itu sendiri. Pancasila menekankan prinsip deliberatif atau musyawarah dalam segala hal, termasuk dalam pengembangan pendidikan karakter. Karenanya penerapan prinsip ini merupakan bagian dari sikap-sikap yang sejalan dengan Pancasila.

C. Kesimpulan

kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Banten yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten merupakan mandat dan kebutuhan masyarakat untuk dapat memberikan dasar normatif dalam penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di wilayah Provinsi Banten. Dengan pemahaman tersebut dan sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten untuk memberikan kepastian hukum terhadap pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.